

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menyebarkan kuesioner dimana dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat. Kuesioner disebarkan kepada 100 responden yang dinyatakan layak sebagai objek penelitian. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari responden menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui media online (*google form*). Data yang diperoleh berjumlah 100 responden, yang mana jumlah tersebut sudah memenuhi ketentuan sampel yang ditetapkan.

Tabel 4. 1

Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang dikirim	100
Kuesioner yang kembali	100
Kuesioner yang dapat digunakan	100
Tingkat pengembalian kuesioner yang dapat digunakan	100%

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023.

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui tingkat pengembalian kuesioner yang dapat digunakan adalah sebesar 100% diihitung dari presentasi jumlah kuesioner yang dapat digunakan. Dari hasil kuesioner yang diterima memperoleh gambaran responden berupa jenis kelamin seperti yang tertera pada table 4.2.

Tabel 4. 2
Profil Responden

Jenis kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-laki	30	30%
Perempuan	70	70%

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023.

4.1.2 Deskripsi Jawaban Responden

Tabel 4. 3
Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pemahaman Perpajakan (X1)

X1	STS	TS	S	SS
X1.1	0	8	69	23
X1.2	0	10	72	18
X1.3	1	4	64	31
X1.4	3	8	65	29
X1.5	0	8	61	28
X1.6	1	9	70	20
X1.7	1	17	70	12

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan jawaban kuesioner pada tabel 4.3 tentang persepsi menunjukkan bahwa:

1. Pernyataan mengenai pemahaman ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku sebanyak 0% menjawab sangat tidak setuju, 8% menjawab tidak setuju, 69% menjawab setuju, dan 23% responden menjawab sangat setuju.
2. Pertanyaan mengenai peraturan batas waktu pelaporan sebanyak 0% menjawab sangat tidak setuju, 10% menjawab tidak setuju, 72% menjawab setuju, dan 18% responden menjawab sangat setuju.
3. Pertanyaan mengenai fungsi NPWP sebagai identitas wajib pajak sebanyak 1% menjawab sangat tidak setuju, 4% menjawab tidak setuju, 64% menjawab setuju, dan 31% responden menjawab sangat setuju.
4. Pertanyaan mengenai pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar sebanyak 3% menjawab sangat tidak setuju, 8% menjawab tidak setuju, 61% menjawab setuju, dan 28% responden menjawab sangat setuju.
5. Pertanyaan mengenai pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah sebanyak 0% menjawab sangat tidak setuju, 8% menjawab tidak setuju, 58% menjawab setuju, dan 34% responden menjawab sangat setuju.

6. Pertanyaan mengenai pemahaman perpajakan saat ini sebanyak 1% menjawab sangat tidak setuju, 9% menjawab tidak setuju, 70% menjawab setuju, dan 20% responden menjawab sangat setuju.
7. Pertanyaan mengenai kesesuaian teori pajak yang berlaku saat ini sebanyak 1% menjawab sangat tidak setuju, 17% menjawab tidak setuju, 70% menjawab setuju, dan 12% responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4. 4

Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Sanksi Perpajakan (X2)

X2	STS	TS	S	SS
X2.1	1	7	63	29
X2.2	0	7	64	28
X2.3	0	6	70	24

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan jawaban kuesioner pada tabel 4.4 tentang penghargaan finansial menunjukkan bahwa:

1. Pernyataan sanksi diberlakukan agar para wajib pajak lebih disiplin dalam pelaporan perpajakan sebanyak 1% menjawab sangat tidak setuju, 7% menjawab tidak setuju, 63% menjawab setuju, 29% menjawab sangat setuju.

2. Pernyataan pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar sebanyak 0% menjawab sangat tidak setuju, 7% menjawab tidak setuju, 64% menjawab setuju, 28% menjawab sangat setuju.
3. Pernyataan pengenaan sanksi yang berlaku atas keterlambatan membayar pajak sebanyak 0% menjawab sangat tidak setuju, 6% menjawab tidak setuju, 70% menjawab setuju, 24% menjawab sangat setuju.

Tabel 4. 5

Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Modernisasi sistem Perpajakan (X3)

X3	STS	TS	S	SS
X3.1	1	2	65	32
X3.2	1	5	73	21
X3.3	1	6	70	23
X3.4	1	3	74	22
X3.5	2	11	64	23
X3.6	4	9	69	18
X3.7	2	3	69	26
X3.8	1	2	72	25
X3.9	2	14	61	23
X3.10	1	6	73	19

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan jawaban kuesioner pada tabel 4.5 tentang penghargaan finansial menunjukkan bahwa:

1. Pernyataan *E-banking* memudahkan saya dalam melakukan pembayaran pajak sebanyak 1% menjawab sangat tidak setuju, 2% menjawab tidak setuju, 65% menjawab setuju, 32% menjawab sangat setuju.
2. Pernyataan e-SPT dan e-Filling sangat efektif sebanyak 1% menjawab sangat tidak setuju, 5% menjawab tidak setuju, 73% menjawab setuju, 21% menjawab sangat setuju.
3. Pernyataan terkait NPWP melalui e-Filling dan e-Form lebih mudah sebanyak 1% menjawab sangat tidak setuju, 6% menjawab tidak setuju, 70% menjawab setuju, 23% menjawab sangat setuju.
4. Pernyataan SPT melalui e-Filling dan e-Form lebih memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak sebanyak 1% menjawab sangat tidak setuju, 3% menjawab tidak setuju, 74% menjawab setuju, 22% menjawab sangat setuju.
5. Pernyataan DJP selalu mensosialisasikan jika terjadi perubahan peraturan banyak 2% menjawab sangat tidak setuju, 11% menjawab tidak setuju, 64% menjawab setuju, 23% menjawab sangat setuju.

6. Pernyataan DJP selalu mensosialisasikan jika terjadi perubahan peraturan banyak 4% menjawab sangat tidak setuju, 9% menjawab tidak setuju, 69% menjawab setuju, 18% menjawab sangat setuju.
7. Pernyataan petugas pajak memberikan sebanyak 2% menjawab sangat tidak setuju, 3% menjawab tidak setuju, 69% menjawab setuju, 26% menjawab sangat setuju.
8. Pernyataan petugas pajak selalu siap membantu sebanyak 1% menjawab sangat tidak setuju, 2% menjawab tidak setuju, 72% menjawab setuju, 25% menjawab sangat setuju.
9. Pernyataan petugas pajak memiliki profesionalisme dalam bekerja sebanyak 2% menjawab sangat tidak setuju, 14% menjawab tidak setuju, 61% menjawab setuju, 23% menjawab sangat setuju.
10. Pernyataan SDM yang dimiliki DJP telah memiliki yang kompeten terutama dibidang perpajakan sebanyak 1% menjawab sangat tidak setuju, 6% menjawab tidak setuju, 73% menjawab setuju, 19% menjawab sangat setuju.

Tabel 4. 6

**Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM (Y)**

Y	STS	TS	S	SS
Y1	2	8	70	20
Y2	1	4	73	22
Y3	0	12	70	18
Y4	2	17	61	20
Y5	1	4	63	32
Y6	0	3	73	24
Y7	0	3	69	28
Y8	0	5	74	21
Y9	0	5	75	20
Y10	0	3	76	21

Sumber: Diolah oleh peneliti dengan SPSS 26, 2023

Berdasarkan jawaban kuesioner pada tabel 4.5 tentang kepatuhan wajib pajak UMKM menunjukkan bahwa:

1. Pernyataan mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri sebanyak 2% menjawab sangat tidak setuju, 8% menjawab tidak setuju, 70% menjawab setuju, 20% menjawab sangat setuju.
2. Pernyataan setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP sebanyak 1% menjawab sangat tidak setuju, 4%

menjawab tidak setuju, 73% menjawab setuju, 22% menjawab sangat setuju.

3. Pernyataan saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak sebanyak 0% menjawab sangat tidak setuju, 12% menjawab tidak setuju, 70% menjawab setuju, 18% menjawab sangat setuju.
4. Pernyataan mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar sebanyak 2% menjawab sangat tidak setuju, 17% menjawab tidak setuju, 61% menjawab setuju, 20% menjawab sangat setuju.
5. Pernyataan penerapan sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak untuk berlaku jujur sebanyak 1% menjawab sangat tidak setuju, 4% menjawab tidak setuju, 63% menjawab setuju, 32% menjawab sangat setuju.
6. Pernyataan pemeriksaan pajak oleh petugas pajak dapat mendorong wajib pajak untuk membayar tepat waktu sebanyak 0% menjawab sangat tidak setuju, 3% menjawab tidak setuju, 73% menjawab setuju, 24% menjawab sangat setuju.
7. Pernyataan banyaknya tempat pembayaran dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu sebanyak 0% menjawab sangat tidak setuju, 3% menjawab

tidak setuju, 69% menjawab setuju, 28% menjawab sangat setuju.

8. Pernyataan tepat waktu dalam membayar pajak sebanyak 0% menjawab sangat tidak setuju, 5% menjawab tidak setuju, 74% menjawab setuju, 21% menjawab sangat setuju.

9. Pernyataan tunggakan pajak hanya akan menambah beban pajak karena adanya bunga tunggakan yang harus dibayarkan sebanyak 0% menjawab sangat tidak setuju, 5% menjawab tidak setuju, 75% menjawab setuju, 20% menjawab sangat setuju.

10. Pernyataan ketersediaan membayar kewajiban pajak beserta tunggakan pajaknya sebanyak 0% menjawab sangat tidak setuju, 3% menjawab tidak setuju, 76% menjawab setuju, 21% menjawab sangat setuju.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif ini diperlukan untuk melihat gambaran data secara umum mengenai jawaban responden melalui kuesioner yang disebar. Analisis statistik untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada table 4.6.

Tabel 4.7
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min.	Max	Mean	Std. Deviation
Pemahaman	100	14.00	28.00	21.9000	2.81948
Sanksi	100	6.00	12.00	9.5800	1.32711
Modernisasi Sistem	100	11.00	40.00	31.4100	4.17326
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	100	25.00	40.00	31.5600	3.55141

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, 2023

Pada tabel 4.6 menunjukkan jumlah responden (N) ada 100, dari 100 responden, dan kuesioner pemahaman perpajakan terdiri dari 7 pernyataan. Nilai minimum untuk variabel pemahaman perpajakan sebesar 0.14 berarti kemungkinan terendah variabel pemahaman perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan nilai maksimum sebesar 0,28 berarti kemungkinan tertinggi variabel pemahaman perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini mengidentifikasi bahwa pemahaman perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai *mean* sebesar 21.9000 dan standar deviasi 2.81948 sehingga dapat disimpulkan bahwa persebaran data pada variabel pemahaman perpajakan sudah stabil karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata.

Dari 100 responden, dan kuesioner Sanksi terdiri dari 3 pernyataan. Nilai minimum untuk variabel sanksi perpajakan sebesar 0.06 berarti

kemungkinan terendah variabel sanksi perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan nilai maksimum sebesar 0,12 berarti kemungkinan tertinggi variabel sanksi perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini mengidentifikasi bahwa sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai *mean* sebesar 9.5800 dan standar deviasi 1.32711 sehingga dapat disimpulkan bahwa persebaran data pada variabel sanksi perpajakan sudah stabil karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata.

Dari 100 responden, dan kuesioner modernisasi sistem perpajakan terdiri dari 10 pernyataan, Modernisasi sistem memiliki nilai minimum untuk variabel modernisasi sistem perpajakan sebesar 0.11 berarti kemungkinan terendah variabel sanksi perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan nilai maksimum sebesar 0,40 berarti kemungkinan tertinggi variabel modernisasi sistem perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini mengidentifikasi bahwa modernisasi sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai *mean* sebesar 31.4100 dan standar deviasi 4.17326 sehingga dapat disimpulkan bahwa persebaran data pada variabel modernisasi sistem perpajakan sudah stabil karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata.

Dari 100 responden, dan kuesioner kepatuhan terdiri dari 10 pernyataan Kepatuhan memiliki nilai minimum untuk variabel modernisasi

sistem perpajakan sebesar 0.25 berarti dan nilai maksimum sebesar 0,40, dan nilai *mean* sebesar 31.5600. Nilai standar deviasi standar devisiasi 3.55141 ini berarti bahwa persebaran data pada variabel kepatuhan wajib pajak sudah stabil karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata.

4.2.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

4.2.2.1 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan dapat untuk mengukur jawaban dari responden (Swari, 2021). Pengukuran validitas dalam penelitian ini dikatakan valid apabila r hitung $>$ r table, jika r hitung $<$ r table maka dinyatakan tidak valid.

Tabel 4. 8

Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman

X1	R hitung	R table (df-2)	Keterangan
X1.1	0.741	0.1966	Valid
X1.2	0.771	0.1966	Valid
X1.3	0.614	0.1966	Valid
X1.4	0.690	0.1966	Valid
X1.5	0.638	0.1966	Valid
X1.6	0.697	0.1966	Valid
X1.7	0.709	0.1966	Valid

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26.2023

Berdasarkan tabel 4.1, dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan mempunyai nilai korelasi lebih besar dari r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa statistik masing-masing indikator untuk variabel pemahaman perpajakan adalah valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

Tabel 4. 9
Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi

X2	R hitung	R table (df-2)	Keterangan
X2.1	0.814	0.1966	Valid
X2.2	0.792	0.1966	Valid
X2.3	0.769	0.1966	Valid

Sumber Pengolahan data dengan SPSS26,2023

Berdasarkan tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan mempunyai nilai korelasi lebih besar dari r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa statistik masing-masing indikator untuk variabel sanksi perpajakan adalah valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

Tabel 4. 10
Hasil Uji Validitas Variabel Modernisasi

X3	R hitung	R table (df-2)	Keterangan
X3.1	0.545	0.1966	Valid
X3.2	0.494	0.1966	Valid
X3.3	0.428	0.1966	Valid
X3.4	0.568	0.1966	Valid

X3.5	0.581	0.1966	Valid
X3.6	0.553	0.1966	Valid
X3.7	0.556	0.1966	Valid
X3.8	0.811	0.1966	Valid
X3.9	0.854	0.1966	Valid
X3.10	0.720	0.1966	Valid

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan mempunyai nilai korelasi lebih besar dari r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa statistik masing-masing indikator untuk variabel modernisasi sistem perpajakan adalah valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

Tabel 4. 11

Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan

Y	R hitung	R table (df-2)	Keterangan
Y1	0.673	0.1966	Valid
Y2	0.719	0.1966	Valid
Y3	0.767	0.1966	Valid
Y4	0.510	0.1966	Valid
Y5	0.658	0.1966	Valid
Y6	0.775	0.1966	Valid
Y7	0.760	0.1966	Valid
Y8	0.737	0.1966	Valid
Y9	0.579	0.1966	Valid
Y10	0.645	0.1966	Valid

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 26, 2026

Berdasarkan tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan mempunyai nilai korelasi lebih besar dari r tabel, maka dapat disimpulkan

bahwa statistik masing-masing indikator untuk variabel Kepatuhan perpajakan adalah valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

4.2.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Menurut Sugiyono (2008:3) suatu koefisien korelasi dikatakan *r* reliabel jika memberikan nilai *Chronbach Alpha* $\geq 0,60$. Reabilitas adalah ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal-hal terkait pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel, dan disusun dalam bentuk kuesioner. Berikut disajikan uji reliabilitas variabel X dan Y.

Tabel 4.12

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>No Item</i>	Keterangan
Pemahaman (X1)	0.817	7	Reliabel
Sanksi (X2)	0.702	3	Reliabel
Modernisasi Sistem (X3)	0.896	10	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0.868	10	Reliabel

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26,2023

Berdasarkan uji realibilitas pada table diatas, menyatakan bahwa:

1. nilai *Cronbach's alpha* dari variabel pemahaman adalah 0,817 dan standar yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah 0,60

sehingga seluruh item pada variabel pemahaman dinyatakan reliabel karena memiliki nilai $> 0,60$.

2. nilai *Cronbach's alpha* dari variabel pemahaman adalah 0,702 dan standar yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah 0,60 sehingga seluruh item pada variabel pemahaman dinyatakan reliabel karena memiliki nilai $> 0,60$.
3. nilai *Cronbach's alpha* dari variabel pemahaman adalah 0,896 dan standar yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah 0,60 sehingga seluruh item pada variabel pemahaman dinyatakan reliabel karena memiliki nilai $> 0,60$.
4. nilai *Cronbach's alpha* dari variabel pemahaman adalah 0,868 dan standar yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah 0,60 sehingga seluruh item pada variabel pemahaman dinyatakan reliabel karena memiliki nilai $> 0,60$.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian terdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, uji *P Plot*, dan uji *Histogram* pada SPSS 26 yang berarti data bisa dikatakan terdistribusi dengan normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$ dan sebaliknya jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tersebut tidak terdistribusikan dengan normal. Adapun

hasil uji normalitas sebelum dilakukan outlier dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.13

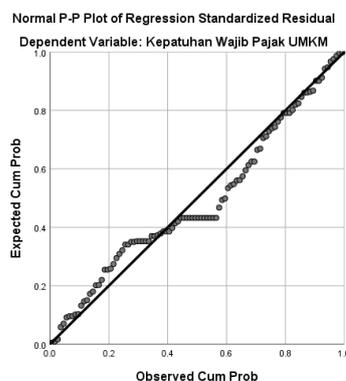
Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov (K-S)

Keterangan	<i>Unstandardized Residual</i>
N	100
<i>Test Statistic</i>	0.139
<i>Asymp. Sig (2-tailed)</i>	0.000
<i>Monte Carlo. Sig (2-tailed)</i>	0.033

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26,2023

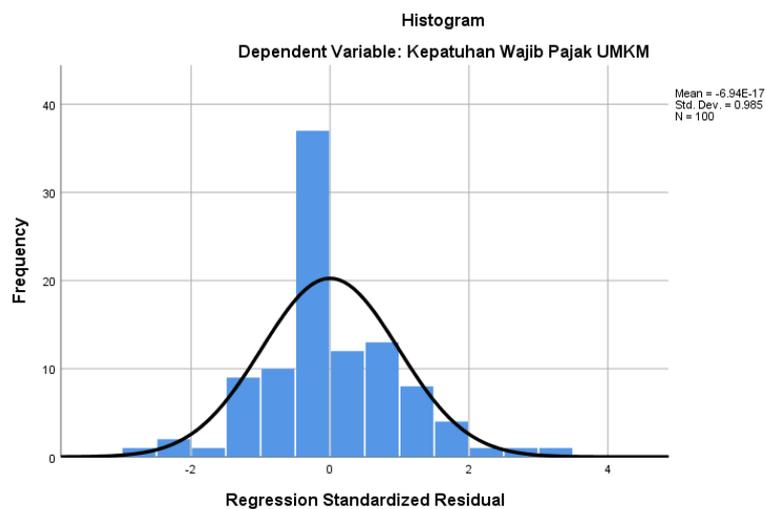
Berdasarkan uji Kolmogrov-Smirnov pada table 4.15, menyatakan bahwa nilai *Monte Carlo. Sig (2-tailed)* adalah $0,033 < 0,05$ maka data residual dalam model refresi belum terdistribusi secara normal, sehingga menyebabkan data tidak layak untuk digunakan analisis selanjutnya.

Analisa lebih lanjut menggunakan *Normal Probability Plot Of Regressi Standardized* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar.4.1 Normalitas P-Plot Sebelum Outlier Data

Pengujian normalitas data dilakukan dengan melihat penyebaran titik data pada sumbu diagonal dalam grafik. Dasar kesimpulan adalah jika titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2021). Dari grafik output SPSS diatas terlihat bahwa titik-titik tidak menyebar sekitar garis diagonal serta penyebarannya tidak mengikuti garis diagonal maka regresi tidak dapat dipakai untuk prediksi tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan variabel independennya. Analisa lebih lanjut menggunakan uji normalitas *Histogram* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar. 4.2 Normalitas Histogram Sebelum outlier data

Berdasarkan output SPSS diatas terlihat grafik Histogram diatas dapat disimpulkan bahwa data belum terdistribusi dengan normal karena memiliki karakteristik berbentuk lonceng tidak sempurna yang mana grafik melenceng ke kiri. Cara yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan eliminasi data outlier. Data outlier

adalah data yang memiliki karakteristik yang menyimpang secara ekstrim dari rata-rata sekumpulan data yang ada, data outlier yang dihapus dalam penelitian ini adalah jumlah responden yang tersedia (Ghozali, 2021).

Eliminasi data outlier yang dilakukan bertujuan agar menghasilkan uji normalitas yang layak untuk digunakan dalam penelitian analisis selanjutnya. Setelah dilakukan eliminasi pada data outlier maka data kembali dilakukan uji normalitas dengan data sampel baru setelah dikurangi data outlier yang berjumlah 9 responden, sehingga menghasilkan 91 sampel data dari jumlah sebelumnya adalah sebanyak 100 sampel. Berikut adalah data outlier dieliminasi:

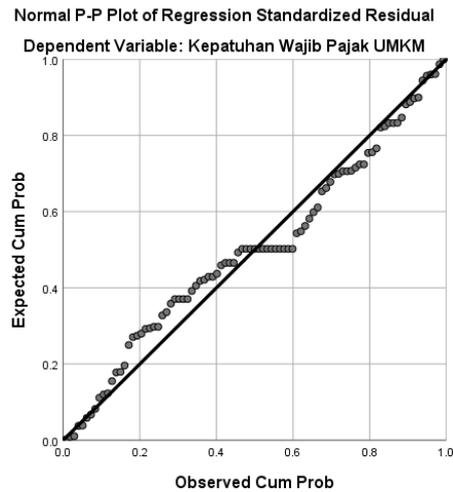
Tabel 4.14

Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov (K-S)

Keterangan	<i>Unstandardized Residual</i>
N	91
<i>Test Statistic</i>	0.102
<i>Asymp. Sig (2-tailed)</i>	0.20
<i>Monte Carlo. Sig (2-tailed)</i>	0.275

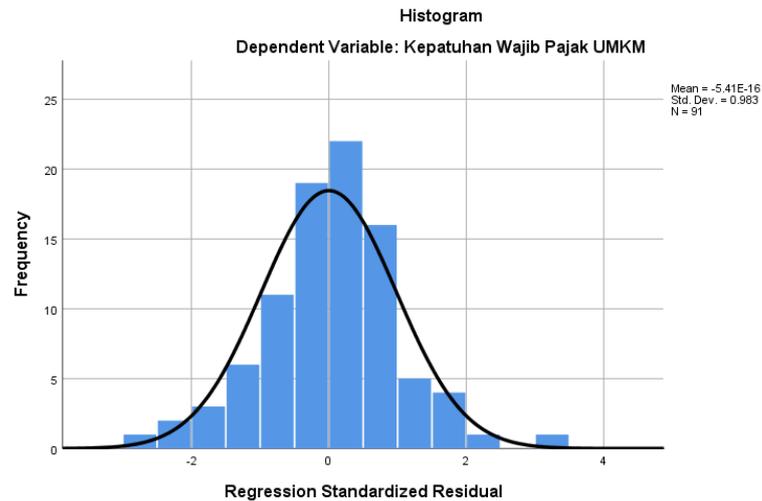
Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26,2023

Berdasarkan tabel 4.16 hasil uji *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan bahwa data sampel terdistribusi secara normal. Hal tersebut terlihat dari nilai *Monte Carlo. Sig (2-tailed)* adalah $0,275 > 0,05$. Analisa lebih lanjut menggunakan *Normal Probability Plot Of Regression Standardized* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar. 4.3 Normalitas P-Plot Ssetelah Outlier Data

Pengujian normalitas data dilakukan dengan melihat penyebaran titik data pada sumbu diagonal dalam grafik. Dasar kesimpulan adalah jika titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dari grafik output SPSS diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti garis diagonal maka regresi dapat dipakai untuk prediksi tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan variabel independennya. Analisa lebih lanjut menggunakan uji normalitas *Histogram* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.4 Normaitas Histogram Setelah Outlier Data

Berdasarkan output SPSS diatas terlihat grafik Histogram diatas dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal karena memiliki karakteristik berbentuk sempurna seperti lonceng dan tidak melenceng ke kanan dan ke kiri.

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas

Metode yang digunakan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas ditemukan dalam model regresi. Untuk mengetahui adanya multikolinearitas dengan cara melihat nilai tolerance (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Dengan cara yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai $TOL \leq 0.10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ karena membandingkan nilai TOL melebihi 10% dengan melihat hasil dari VIF dibawah 10 (Ghozali, 2021).

Tabel 4.15
Hasil Uji Multikolinearitas

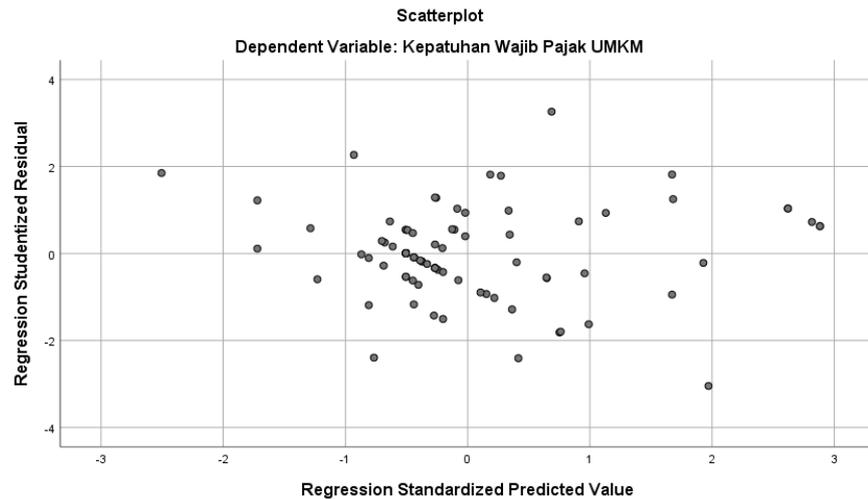
Variabel	Tolerance (TOL)	VIF	Keterangan
Pemahaman	0.500	2.001	Bebas Multikolinearitas
Sanksi	0.686	1.452	Bebas Multikolinearitas
Modernisasi	0.467	2.143	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26,2023

Berdasarkan table 4.16 hasil multikolinearitas menunjukkan nilai VIF semua variabel independent < 10 dan nilai tolerance > 0.10 maka dapat disimpulkan semua variabel independent bebas multikolineraritas.

4.2.3.1 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variansi model residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2021). Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi heterokedastisitas dengan melihat scatterplot. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan scatterplot dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar4.5 Scaterplot Heterokedastisitas

Berdasarkan gambar uji heteroskedastisitas di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak, titik-titik menyebar baik diatas maupun dibawah dalam nilai 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi semua variabel tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.2.4 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda yang dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga variabel independent yang terdiri dari pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, modernisasi sistem perpajakan dan satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Berikut hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 4.16

Hasil Uji Analisis Regresi linear Berganda

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>
	B	<i>Std. Error</i>	Beta
Constanta	3.288	2.108	
Pemahaman	0.172	0.109	0.136
Sanksi	0.478	0.187	0.189
Modernisasi	0.627	0.094	0.599

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26,2023

Berdasarkan table 4.17 maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

$$Y = 3.288 + 0,172X_1 + 0,478X_2 + 0,627X_3 + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai konstanta bernilai sebesar 3,288 menyatakan bahwa jika variabel independent dianggap konstan (bernilai 0), maka nilai tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 3,288.
2. Nilai koefisien regresi pemahaman perpajakan sebesar 0,172 yang artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel pemahaman perpajakan sebesar 100% dengan asumsi ceteris paribus (variabel sanksi dan modernisasi sistem bersifat konstan atau tetap), maka pemahaman untuk kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat 17,2%.

3. Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan sebesar 0,478 yang artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel pemahaman perpajakan sebesar 100% dengan asumsi ceteris paribus (variabel pemahaman dan modernisasi sistem bersifat konstan atau tetap), maka sanksi untuk kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat 47,8%.
4. Nilai koefisien regresi modernisasi sistem perpajakan sebesar 0,627 yang artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel pemahaman perpajakan sebesar 100% dengan asumsi ceteris paribus (variabel pemahaman dan sanksi bersifat konstan atau tetap), maka sanksi untuk kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat 62,7%.

4.2.5 Uji Hipotesis

4.2.5.1 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui berapa banyak kontribusi yang dimiliki variabel independen terhadap variabel dependen. Peneliti melakukan pengujian koefisien korelasi (R) dan pengujian koefisien determinasi nilai *adjust R square* (R)².

Tabel 4.17
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.820 ^a	.673	.661	1.86457

a. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem, Sanksi, Pemahaman

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26.2023

Berdasarkan tabel 4.20 diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi terdapat pada nilai *R Square* sebesar 0,673. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y sebesar 67,3%.

4.2.5.2 Uji F

Uji F merupakan pengujian terhadap koefisien regresi secara bersama-sama (simultan), jika nilai signifikan $\leq 0,05$ karena signifikansi model regresi lebih rendah dari 5% maka secara bersama-sama (simultan) independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya jika signifikan $\geq 0,05$ maka independen secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. F tabel 2,705.

Tabel 4.18
Hasil Uji F (Simultan)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	621.294	3	207.098	59.569	.000 ^b
	Residual	302.465	87	3.477		
	Total	923.758	90			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

b. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem, Sanksi, Pemahaman

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26,2023

Berdasarkan pengujian pada tabel 4.19 diatas menunjukkan nilai F hitung sebesar 59,569 dengan nilai F tabel 2,705 sehingga nilai F hitung > F tabel atau $59,569 > 2,705$ dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka signifikansi H4 diterima atau dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.2.5.3 Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial (individu) dari variabel-variabel independent terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan apabila nilai sig < 0,05 dan t hitung > tabel maka terdapat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. T tabel (0,025:91) = 1,986.

Tabel 4. 19
Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1							
	(Constant)	3.288	2.108		1.560	.122	
	Pemahaman	.172	.109	.136	1.569	.120	.500
	Sanksi	.478	.187	.189	2.558	.012	.689
	Modernisasi Sistem	.627	.094	.599	6.671	.000	.467

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26,2023

Berdasarkan uji parsial (uji t) diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan

Pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajin pajak UMKM. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel pemahaman sebesar 0,120 atau $> 0,05$ dan t hitung lebih kecil dari t tabel ($1,569 < 1,986$), maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan

Sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajin pajak UMKM. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel pemahaman sebesar 0,012 atau $< 0,05$ dan t hitung lebih kecil dari t tabel ($2,558 > 1,986$), maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima.

3. Pengaruh Modernisasi Sistem

Modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel pemahaman sebesar 0,000 atau $< 0,05$ dan t hitung lebih kecil dari t tabel ($6,671 > 1,986$), maka dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima.

4.3 Ringkasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan pengujian hipotesis, hasil pengujian menunjukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif tidak terbukti secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan 0,120 ($0,120 < 0,05$), koefisien regresi sebesar 0,172 dan juga memiliki t hitung 1,569 dan t tabel 1,986 (t hitung $< t$ tabel) menunjukan bahwa variabel pemahaman tidak berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. Seperti yang dijelaskan *behavioral belief* tentang bagaimana cara pandang wajib pajak terhadap pemahaman perpajakan tidak mencapai kapasitas para pelaku UMKM serta persepsi terhadap aparat pajak yang masih rendah.

Robbins dan Judge dalam Putra A. F., (2020) menyatakan bahwa teori atribusi berfungsi untuk mengamati perilaku seseorang yang menentukan bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku yang berasal dari faktor internal dan eksternal, dimana pemahaman perpajakan merupakan

faktor internal yang akan menentukan bagaimana wajib pajak akan bertindak sesuai pemahamannya untuk mentaati dan mematuhi kewajiban perpajakannya. Penyuluhan berupa sosialisasi mengenai pemahaman perpajakan juga sudah jarang ditemui dikalangan para pelaku UMKM sehingga menjadi penyebab wajib pajak belum sepenuhnya memahami hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, maka teori atribusi gagal menjelaskan hubungan antara pemahaman pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM, hal tersebut akan mempengaruhi reaksi atau perilaku wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan mengetahui hasil dari tindakan tersebut (Putra A. F., 2020). Jadi, dapat disimpulkan bahwa H_1 pada penelitian ini ditolak. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nurhamid & Sutjahyani, (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari.

4.3.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan pengujian hipotesis, hasil pengujian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan 0,012 ($0,012 > 0,05$) dan t hitung lebih kecil dari t tabel ($2,558 > 1,986$), koefisien regresi sebesar 0,478 dan juga memiliki t hitung 2,558 dan t

tabel 1,986 ($t_{hitung} > t_{tabel}$) menunjukkan bahwa variabel sanksi berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian ini sejalan dengan *Theori of Planned Behavioral* pada pengaruh tekanan *behavioral belief* yang mana teori ini menekankan bahwa keyakinan individu atau wajib pajak atas keberadaan sanksi perpajakan sebagai alat *prefentif* agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Setyani, Harimurti, & Suharno, 2022). Sanksi perpajakan menurut Undang-Undang perpajakan terdiri dari 2 yaitu sanksi administrasi dimana pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa denda, bunga, dan kenaikan tarif pajak sesuai perundang-undangan dan sanksi pidana berupa penjara sesuai hukum pidana yang berlaku atau penderitaan yang merupakan suatu alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi sehingga hal tersebut akan mempengaruhi reaksi dalam bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan tersebut (Setyani, Harimurti, & Suharno, 2022).

Control belief yang mana teori ini menjelaskan bagaimana keyakinan wajib pajak perihal adanya sanksi perpajakan yang menjadi kontrol untuk melakukan suatu perilaku wajib pajak meyakini bahwa akan dilkaskan pemberian sanksi yang berat jika melakukan suatu pelanggaran dan tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Dan dalam teori atribusi sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku bagaimana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Jadi, dapat disimpulkan H₂ pada penelitian ini diterima. Penerapan sanksi

kepada seseorang yang tidak patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakannya bisa menjadi salah satu faktor yang mendukung dan meningkatkan kepatuhan pajak sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hal ini berarti apabila sanksi yang diterima adalah bagian dari pelanggaran yang telah dilakukan akan mempunyai konsekuensi hukum dan denda. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putra A. F., (2020), Cahyani & Noviari, (2019), Lestari, Syafi'i, & Masyad, (2021) yang menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.3 Pengaruh Modernisasi Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan pengujian hipotesis, hasil pengujian menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan 0,000 ($0,000 < 0,05$). Koefisien regresi sebesar 0,627 dan juga memiliki t hitung 6,671 dan t tabel 1,986 ($t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$) menunjukkan bahwa variabel pemahaman berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. Jadi, dapat disimpulkan H_3 pada penelitian ini diterima. Modernisasi sistem adalah salah satu kemudahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM.

Dalam *Theori of Planned Behavioral* variabel modernisasi sistem perpajakan termasuk dalam *behavioral belief* yang mana teori ini menjelaskan bahwa keyakinan individu atau wajib pajak atas keberadaan modernisasi sistem perpajakan seperti *e-registration* yang mana sistem tersebut diterapkan untuk membantu mempermudah subjek pajak mendaftarkan dirinya tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), *e-filling* sebagai bentuk modernisasi administrasi sebagai sarana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), *e-billing* menurut DJP adalah sistem bayar pajak online dengan cara pembuatan kode billing terlebih dahulu. Dimana *e-billing* ini hadir untuk mewujudkan komitmen DJP dalam pengalihan sistem manual menuju sistem elektronik perpajakan, selain itu *e-objection* juga hadir sebagai fasilitas yang diberikan DJP dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian surat keberatan serta memudahkan wajib pajak menyampaikan keluhan (Setyani, Harimurti, & Suharno, 2022).

Modernisasi sistem akan mempengaruhi perilaku dalam bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan tersebut. *Control belief* yang mana teori ini menjelaskan bagaimana keyakinan wajib pajak perihal adanya modernisasi sistem perpajakan yang menjadi kontrol pendukung untuk memudahkan wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya (Sari & Rejeki, 2021). Dalam teori atribusi modernisasi sistem perpajakan merupakan faktor eksternal yang mendukung sehingga dapat mempengaruhi perilaku bagaimana wajib pajak bertindak untuk mematuhi

kewajiban perpajakannya. Hal ini di dukung dengan penerapan prinsip *Self Assesment System* yang mewajibkan seorang wajib pajak untuk ikut serta aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putra A. F., (2020), Putra A., (2017), Sari & Rejeki, (2021) yang menunjukan hasil bahwa modernisasi sistem perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.